



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# RENCANA AWAL RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
2022



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2598/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan Periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024;
  - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024;
  - d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024;
  - e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Nopember 2022

a.n. Walikota Denpasar  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Dan Desa Kota Denpasar,



I Wayan Budha, S.IP., M.A.P  
Pembina Tk. I  
NIP. 197007151992011001

Tembusan ini disampaikan Kepada

- Yth. 1. Walikota Denpasar  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar  
3. Inspektur Kota Denpasar  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar  
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar  
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2022  
NOMOR : 188.45/2598/HK/2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR KOTA  
DENPASAR TAHUN 2024

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar  
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris  
Daerah Kota Denpasar  
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah  
Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota  
Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota  
Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar  
2. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan  
Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kota Denpasar  
3. Kepala Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan  
Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar  
4. Para Jabatan Fungsional dan Kasubag pada Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar  
5. Staf pada Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

6. Staf pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
7. Staf pada Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
8. Staf pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Dan Desa Kota Denpasar,



f Wayan Budha, S.IP., M.A.P  
Pembina Tk. I  
NIP. 197007151992011001

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa maka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan di Tahun 2024.

Saran-saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 02 Desember 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kota Denpasar



**I Wayan Budha, S.IP., M.A.P**

Pembina Tk. I

NIP. 197007151992011001

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| Kata Pengantar  | i  |
| Daftar isi  | ii |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>  |    |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 2  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 7  |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 8  |
| <b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021</b>          |    |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 9  |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 26 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....                           | 27 |
| <b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>  |    |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....  | 31 |
| 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....   | 31 |
| 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....   | 32 |
| <b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>  | 41 |
| <b>BAB V : PENUTUP</b>  | 45 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2024 ini merupakan penjabaran awal daripada rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, rencana perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan awal ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini di dalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2022 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2023. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Bali maupun Nasional.

Tidak bisa dipungkiri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Hal ini mengingat Desa adalah lingkup terkecil dari sebuah negara sekaligus pemerintahan terbawah yang langsung menyentuh masyarakat. Terlebih lagi dalam tahun 2020 adanya pandemic virus corona 19 (covid -19) dimana Desa menjadi tempat awal dalam pemberdayaan dan pengenalan protokol kesehatan baru sekaligus pemulihan ekonomi.

Ditengah pandemi dan keterpurukan ekonomi yang disebabkan oleh dampak virus corona, masyarakat Desa dituntut bersatu dan melakukan inovasi – inovasi agar bisa beradaptasi dengan kehidupan normal yang baru (New Normal). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan perubahan struktur sesuai dengan Visi dan Misi Kota Denpasar melalui Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju, dengan Misinya ; Meningkatkan kemakmuran masyarakat kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan; Menjaga Stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana; Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*); Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana dan Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali, yang mana reformasi pada sektor ekonomi pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang mengarahkan semua unsur yang mempengaruhi Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) berdasarkan hal tersebut, disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
21. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24).
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56);

24. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dimaksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan prinsip-prinsip *good governance* (penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme) sesuai dengan Visi dan Misi.

Penyusunan rancangan awal rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2024, yang merupakan penjabaran tahun pertama daripada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan Desa.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

### Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

### Bab V. Penutup

### Lampiran

## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2022**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 melalui APBD Kota Denpasar terdiri dari 4 program dan 8 kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5 Kegiatan)
- b) Program Peningkatan Kerjasama Desa (1 Kegiatan)
- c) Program Administrasi Pemerintah Desa (1 Kegiatan)
- d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (1 Kegiatan)

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar mendapatkan Pagu Anggaran induk (Belanja Langsung) sebesar Rp. 10.216.305.319,- melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp. 9.713.741.585,- . Adapun realisasi anggaran sampai Bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp. 9.403.938.618 (97%) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2022 menurut program dapat dilihat sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2022

| <b>Kode Program</b> | <b>Uraian</b>   | <b>Anggaran (Rp)</b> | <b>Realisasi Belanja (Rp)</b> | <b>% Realisasi</b> |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2.13.01             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7.183.002.165        | 7.021.527.848                 | 98,00%             |
| 2.13.03             | Program Peningkatan Kerjasama Desa                          | 11.563.600           | 9.773.200                     | 85,00%             |
| 2.08.04             | Program Administrasi Pemerintahan Desa                      | 496.835.520          | 475.864.795                   | 96,00%             |
| 2.13.05             | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga        | 2.022.340.300        | 1.896.772.775                 | 94,00%             |
|                     | <b>Jumlah</b>   | <b>9.713.741.585</b> | <b>9.403.938.618</b>          | <b>97,00%</b>      |

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra dalam bentuk tabel seperti tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

| Kode |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Target Kinerja Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Tahun 2022 |
|------|----|----|------|----|--|--|---------------------------|-------------------------------------|
| 1    |    |    |      |    | 2  | 3  | 4                         | 5                                   |
| 2    | 13 | 01 |      |    | <b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>       |  |                           |                                     |
| 2    | 13 | 01 | 2.02 |    | <b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                   |  |                           |                                     |
| 2    | 13 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN   | 1 Tahun                   | 1 Tahun                             |
| 2    | 13 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                              | Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa   | 1 Tahun                   | 1 Tahun                             |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 |    | <b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                       |  |                           |                                     |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai   | 100%                      | 100%                                |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | -Alat Tulis Kantor yang tersedia<br>-Kantor yang terjaga kebersihannya<br>-Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | -100%<br>-100%<br>-100%   | -100%<br>-100%<br>-100%             |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                    | Barang cetakan dan pengadaan yang tersedia   | 100%                      | 100%                                |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang                     | Bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia  | 12 Bulan                  | 12 Bulan                            |

| Kode |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Target Kinerja Tahun 2022                        | Realisasi Target Kinerja Tahun 2022              |
|------|----|----|------|----|--|--|--|--|
| 1    |    |    |      |    | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 2    | 13 | 01 | 2.08 |    | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |  |  |  |
| 2    | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia   | 100%   | 100%   |
| 2    | 13 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | -BPJS Perangkat Desa yang terbayarkan<br>-Jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia<br>-Konsumsi yang tersedia<br>-Perjalanan Dinas yang tersedia | - 1 Tahun<br>- 1 Tahun<br>- 1 Tahun<br>- 1 Tahun | - 1 Tahun<br>- 1 Tahun<br>- 1 Tahun<br>- 1 Tahun |
| 2    | 13 | 01 | 2.09 |    | <b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                            |  |  |  |
| 2    | 13 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya pemeliharaan dan kebutuhan kendaran dinas operasional   | 100%   | 100%   |
| 2    | 13 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel   | Terpenuhinya pemeliharaan mebel  | 100%   | 100%   |
| 2    | 13 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | 100%   | 100%   |
| 2    | 13 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung  | 100%   | 100%   |

| Kode |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan           | Target Kinerja Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Tahun 2022 |
|------|----|----|------|----|---|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3   | 4                         | 5                                   |
| 2    | 13 | 01 | 2.07 |    | <b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |   |                           |                                     |
| 2    | 13 | 01 | 2.07 | 06 | Pengandaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya                   | 5 Unit                    | 5 Unit                              |
| 2    | 13 | 03 |      |    | <b>Program : Peningkatan Kerjasama Desa</b>   |   |                           |                                     |
| 2    | 13 | 03 | 2.01 |    | <b>Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>                                      |   |                           |                                     |
| 2    | 13 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Kerjasamaantar Desa dalam Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Desa yang terfasilitasi kerjasama desa             | 27 Desa                   | 27 Desa                             |
| 2    | 13 | 04 |      |    | <b>Program : Administrasi Pemerintahan Desa</b>   |   |                           |                                     |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 |    | <b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa</b> |   |                           |                                     |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  | Jumlah desa yang mendapat pengawasan pengelolaan keuangan | 27 Desa                   | 27 Desa                             |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                   | Jumlah BUMDES yang dibina                                 | 27 Desa                   | 27 Desa                             |

| Kode |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                 | Target Kinerja Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Tahun 2022 |
|------|----|----|------|----|---|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3   | 4                         | 5                                   |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa   | Jumlah Perbekel yang Dilantik                                   | 4 Perbekel                | 4 Perbekel                          |
| 2    | 13 | 05 |      |    | <b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>  |   |                           |                                     |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 |    | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |   |                           |                                     |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat   | Jumlah Laporan Swadaya Murni dan Swadaya Penunjang yang terdata | 1 Laporan                 | 1 Laporan                           |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  | Jumlah Pasar Desa yang difasilitasi                             | 32 Pasar                  | 32 Pasar                            |

| Kode |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan              | Target Kinerja Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Tahun 2022 |
|------|----|----|------|----|---|--|---------------------------|-------------------------------------|
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3  | 4                         | 5                                   |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  | Jumlah Desa/Kel yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong | 43 Des/kel                | 43 Des/kel                          |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah des/kel yang mendapat pembinaan PKK                   | 43 Des/kel                | 43 Des/kel                          |

Tabel 2.2  
Perkiraan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

| Kode            | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
|                 |  |  |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%) |
| 1               | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 = (10/4)                                   |
| 2 13 01         | <b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>       | <b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>                                | <b>100%</b>  |  |  |
| 2 13 01 2.02    | <b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                   | <b>Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>              | <b>100%</b>  |  |  |
| 2 13 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 29 Orang/Bulan   | 29 Orang/Bulan   | 10%  |
| 2 13 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | 1 Dokumen  | -  | -  |
| 2 13 01 2.06    | <b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                       | <b>Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                  | <b>100%</b>  |  |  |
| 2 13 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket  | 1 Paket  | 10%  |

| Kode |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|----|----|------|----|--|--|--|--|--|
|      |    |    |      |    |  |  |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%) |
| 1    |    |    |      |    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 = (10/4)                                   |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 10 Paket   | -  | -  |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket  | -  | -  |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 5 Dokumen  | -  | -  |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan  | -  | -  |
| 2    | 13 | 01 | 2.08 |    | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>       | <b>Presentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>              | <b>100%</b>  |  |  |
| 2    | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan   | 1 Laporan  | 10%  |
| 2    | 13 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan   | 1 Laporan  | 10%  |

| Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |  |  |             |         |     |
|------|--|---|--|--|--|--|--|-------------|---------|-----|
|      |  |   |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%) |  |  |             |         |     |
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6 = (10/4)                                   |  |  |             |         |     |
| 2    | 13   | 01  | 2.09   |  |  | <b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                            | <b>Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>   | <b>100%</b> |         |     |
| 2    | 13   | 01  | 2.09   | 02   |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 24 Unit     | 24 Unit | 10% |
| 2    | 13   | 01  | 2.09   | 05   |  | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 20 Unit     | -       | -   |
| 2    | 13   | 01  | 2.09   | 06   |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 85 Unit     | -       | -   |
| 2    | 13   | 01  | 2.09   | 10   |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit      | -       | -   |
| 2    | 13   | 01  | 2.07   |  |  | <b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                               | <b>Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>   | <b>100%</b> |         |     |
| 2    | 13   | 01  | 2.07   | 6  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan  | 64 Unit     | -       | -   |

| Kode | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|--|---|--|--|--|
|      |  |   |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%) |
| 1    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6 = (10/4)                                   |
| 2    | 13   | 03  |  |  |  |
|      |  |   |  |  |  |
|      |  |   |  |  |  |
| 2    | 13   | 03  | 2.01   |  |  |
|      |  |   |  |  |  |
| 2    | 13   | 03  | 2.01   | 01   |  |
|      |  |   |  |  |  |
| 2    | 13   | 04  |  |  |  |
|      |  |   |  |  |  |
| 2    | 13   | 04  | 2.01   |  |  |
|      |  |   |  |  |  |
| 2    | 13   | 04  | 2.01   | 04   |  |
|      |  |   |  |  |  |
| 2    | 13   | 04  | 2.01   | 08   |  |
|      |  |   |  |  |  |
| 2    | 13   | 04  | 2.01   | 11   |  |
|      |  |   |  |  |  |

| Kode |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|----|----|------|----|--|--|--|--|--|
|      |    |    |      |    |  |  |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%) |
| 1    |    |    |      |    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 = (10/4)                                   |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa   | 27 Dokumen   | -  | -  |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan   | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                 | 10 Dokumen   | -  | -  |
| 2    | 13 | 05 |      |    | <b>Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>   | <b>Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif</b>  | <b>100%</b>  |  |  |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 |    | <b>Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>-Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif<br/>-Jumlah Pasar Desa dengan fasilitasi yang baik</b> | <b>27 LKD<br/>15 Pasar</b>   |  |  |

| Kode                        | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|                             |  |  |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%) |
| 1                           | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 = (10/4)                                   |
| 2<br>13<br>05<br>2.01<br>02 | Fasilitasi Penataan, PEMBERDAYAAN dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, PEMBERDAYAAN dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 2 Dokumen  | -  | -  |
| 2<br>13<br>05<br>2.01<br>05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  | 1 Dokumen  | -  | -  |
| 2<br>13<br>05<br>2.01<br>07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  | 1 Laporan  | -  | -  |
| 2<br>13<br>05<br>2.01<br>09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga   | 1 Dokumen  | -  | -  |

| Kode |    |    |      |    | Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|----|----|------|----|---|--|--|--|--|
|      |    |    |      |    |   |  |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023                          | Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%) |
| 1    |    |    |      |    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6 = (10/4)                                   |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 27 Lembaga   | -  | -  |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna   | 1 Laporan  | -  | -  |

## Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2022 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

| No.      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Anggaran<br>(Rp)     | Realisasi            |               |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|          |  |                      | Jumlah (Rp)          | Daya<br>Capai |
| <b>1</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>   | <b>7.183.002.165</b> | <b>7.021.527.848</b> | <b>97,75%</b> |
|          | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 4.570.376.106        | 4.506.880.671        | 98,61%        |
|          | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN   | 3.000.000            | 3.000.000            | 100,00%       |
|          | - Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 3.749.160            | 3.749.160            | 100,00%       |
|          | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 156.114.176          | 149.123.155          | 95,52%        |
|          | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 37.069.000           | 36.969.000           | 99,73%        |
|          | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan  | 24.539.643           | 24.503.292           | 100,00%       |
|          | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 36.506.380           | 35.550.000           | 97,38%        |
|          | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik   | 103.200.000          | 88.796.180           | 86,04%        |
|          | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.918.387.700        | 1.850.613.590        | 96,47%        |
|          | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau Lapangan | 228.110.000          | 222.337.800          | 97,47%        |
|          | - Pemeliharaan Mebel   | 5.200.000            | 5.200.000            | 100,00%       |
|          | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 76.750.000           | 74.820.000           | 97,48%        |
|          | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                   | 20.000.000           | 19.985.000           | 99,92%        |
| <b>2</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA<br/>DESA</b>  | <b>11.563.600</b>    | <b>9.773.200</b>     | <b>84,52%</b> |
|          | - Fasilitasi Kerja Sama ANtar Desa dalam<br>Kabupaten/Kota   | 11.563.600           | 9.773.200            | 84,52%        |
| <b>3</b> | <b>PROGRAM ADMINISTRASI<br/>PEMERINTAHAN DESA</b>  | <b>496.835.520</b>   | <b>475.864.795</b>   | <b>95,78%</b> |

| No.      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Anggaran<br>(Rp)     | Realisasi            |               |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|          |  |                      | Jumlah (Rp)          | Daya<br>Capai |
| -        | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa   | 72.532.800           | 71.735.800           | 98,90%        |
| -        | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa  | 43.267.530           | 41.839.830           | 96,70%        |
| -        | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa  | 381.035.190          | 362.289.165          | 95,08%        |
| <b>4</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>   | <b>2.022.340.300</b> | <b>1.896.772.775</b> | <b>93,79%</b> |
| -        | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 127.219.420          | 118.078.500          | 92,81%        |
| -        | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa   | 134.693.750          | 128.695.750          | 95,55%        |
| -        | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat   | 5.867.600            | 5.598.200            | 95,41%        |
| -        | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  | 1.754.559.530        | 1.644.400.325        | 93,72%        |
|          | <b>JUMLAH</b>  | <b>9.713.741.585</b> | <b>9.403.938.618</b> | <b>96,81%</b> |

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar berpedoman pada Rencana Strategis DPMD Kota Denpasar dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, seperti diamanatkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Sebagaimana yang terurai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026 bahwa DPMD mengacu pada Misi ke-3 "Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance)" dan Misi ke-5 "Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali".

Atas dasar strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, maka DPMD Kota Denpasar menetapkan satu (1) sasaran yaitu :

1. Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan dengan indikator kinerja utama " Indeks Desa Membangun dan Profil Desa"

Adapun pencapaian kinerja pelayanan DPMD Kota Denpasar telah disajikan melalui tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar  
Kota Denpasar

| No  | Indikator                         | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK   | Target Renstra Perangkat Daerah |               |               |               | Realisasi<br>Capaian |               | Proyeksi      |               | Catatan<br>Analisa |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|     |                                   |                             |       | Tahun<br>2021                   | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2021        | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 |                    |
| (1) | (2)                               | (3)                         | (4)   | (5)                             | (6)           | (7)           | (8)           | (9)                  | (10)          | (11)          | (12)          | (13)               |
| 1   | Indeks Desa<br>Membangun<br>(IDM) |                             | Nilai | 0.894                           | 0.910         | 0.940         | 0.960         | 0.895                | 0.9215        | 0.910         | 0.940         |                    |

## 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 1. Tingkat Kinerja Pelayanan DPMD Kota Denpasar dan Hal Kritis yang terkait Pelayanan DPMD Kota Denpasar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kota Denpasar mempunyai fungsi:

- a) Membuat Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b) Memberikan pelayanan umum, urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang meliputi Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan profesionalisme pemerintah desa
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. **Permasalahan Dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD Kota Denpasar**

Beberapa permasalahan masih mungkin dihadapi oleh DPMD Kota Denpasar tahun 2023. Secara umum DPMD Kota Denpasar masih kurangnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan masih menghadapi kurangnya kapasitas aparatur desa.

a) Dari aspek kualitas sumber daya aparatur, jumlah SDM yang terdiri dari PNS sebanyak 24 orang dan 4 CPNS, dengan kualifikasi terdiri dari :

- Sarjana Teknik : -
- Sarjana Ekonomi : 8 orang
- Sarjana Hukum : -
- Sarjana Sosial : 1 orang
- Sarjana Komputer : 1 orang
- Sarjana STP : 1 orang
- Sarjana Tr. IP : 1 orang
- Sarjana Peternakan : 1 orang
- Sarjana Sastra : 2 orang
- Sarjana Seni : -
- Sarjana Pendidikan : -
- Sarjana TI : -
- Sarjana Ilmu Politik : 2 orang
- Sarjana Ilmu Pemerintahan : 1 orang
- Ahli Madya : 1 orang
- SMA/Sederajat : 7 orang
- Dibawah SMA : 2 orang

Kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur masih kurang memadai, dibandingkan beban tugas yang harus dilaksanakan.

- b) Dari aspek kuantitas sumber daya aparatur, memiliki 28 personil dengan rincian :

| <b>Kualifikasi Pendidikan</b> | <b>Jenis Kelamin</b> |                  |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
|                               | <b>Laki-Laki</b>     | <b>Perempuan</b> |
| S2                            | 3 orang              | 2 orang          |
| S1                            | 7 orang              | 6 orang          |
| D1/D2/D3/SarMud               | -                    | 1 orang          |
| SMA/Sederajat                 | 4 orang              | 3 orang          |
| Dibawah SMA                   | 2 orang              | -                |
| <b>Total</b>                  | <b>16 orang</b>      | <b>12 orang</b>  |

Jumlah sumber daya aparatur masih sangat kurang/terbatas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan sedikit mengalami hambatan karena keterbatasan personil dan kekurangan tenaga yang berkompeten dalam bidangnya untuk melakukan penyusunan, pengkajian, pelaporan dan penatausahaan.

### **3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian DPMD Kota Denpasar**

Perlunya usaha yang lebih besar untuk menstimulasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan desa.

### **4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan DPMD Kota Denpasar**

Disamping permasalahan – permasalahan tersebut Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan terutama pasca terjadinya pandemic covid-19.

Selain tantangan terdapat peluang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya regulasi/acuan-acuan dan lain-lain
- b. Adanya fasilitasi/sarana dan prasarana yang memadai
- c. Adanya komunikasi, kerjasama, yang baik antara DPMD dan Desa sehingga pembinaan dan pendampingan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik

#### **5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi**

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa untuk kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan yang mampu menunjang peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Memperkuat kualitas SDM perangkat Desa, pengurus kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola lembaga perekonomian desa melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi.

## **BAB. III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam penyusunan perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta seluruh stakeholders untuk mendapatkan suatu input rencana pembangunan prioritas yang bertitik tolak dari permasalahan serta hambatan-hambatan yang ada, dalam pengembangan rencana program di daerah diperlukan harmonisasi terkait penyelenggaraan pembangunan untuk sinergitas antara lembaga pusat dan daerah.

Selain itu, faktor permasalahan dalam pelayanan institusi dalam pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum sepenuhnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang mengarah langsung terhadap kelompok usaha ekonomi produktif yang ada di daerah pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat setempat, hal ini kedepan merupakan prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2024 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita-cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai, maka Tujuan dan sasaran Renja merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintah namun berdasarkan pada kriteria-kriteria dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026:

### **Meningkatnya Kualitas Kemandirian Desa**

Pencapaian sasaran agar efektif harus bersifat spesifik, dapat dilaksanakan, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil. Adapun sasaran yang hendak dicapai :

Sasaran :

Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan

### **3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024**

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kota Denpasar**

| Kode  | Usuran/Bidang<br>Usuran Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>/Kegiatan | Rencana Tahun 2024 |  |   |  | Catatan Penting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 |                                  |             |                       |               |
|---|--|--|--------------------|--|---|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
|   |  |  | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja  | Kebutuhan<br>Dana/Pagu Indikatif  | Sumber Dana  |                  | Target<br>Capaian<br>Kinerja      | Kebutuhan<br>Dana/Pagu Indikatif |             |                       |               |
| 1   | 2  | 3                                      | 4                  | 5  | 6   | 7  | 8                | 9                                 | 10                               |             |                       |               |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |  |                    |  |   |  |                  |                                   |                                  |             |                       |               |
| 2   | 13   | 01                                     |                    | <b>Program :</b><br><b>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase pemenuhan<br/>layanan kesekretariatan</b>                       | <b>Kota<br/>Denpasar</b>   | <b>100%</b>      | <b>10.241.814.198</b>             | <b>Sekretariat</b>               | <b>100%</b> | <b>11.265.995.618</b> |               |
| 2   | 13   | 01                                     | 2.02               | <b>Kegiatan :</b><br><b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                 | <b>Presentase Terpenuhinya<br/>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b> | <b>Kota<br/>Denpasar</b>   | <b>100%</b>      | <b>6.810.965.580</b>              | <b>Sekretariat</b>               | <b>100%</b> | <b>7.492.062.138</b>  |               |
| 2   | 13   | 01                                     | 2.02               | 01   | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                  | Kota<br>Denpasar | 35 Orang/Bulan                    | 6.807.965.580                    | Sekretariat | 35<br>Orang/Bulan     | 7.488.762.138 |
| 2   | 13   | 01                                     | 2.02               | 02   | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN | Kota<br>Denpasar | 1 Dokumen                         | 3.000.000                        | Sekretariat | 1 Dokumen             | 3.300.000     |

|   |    |    |      |    |  |   |                          |             |                    |  |                    |             |                    |
|---|----|----|------|----|--|---|--------------------------|-------------|--------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|
| 2 | 13 | 01 | 2.06 |    | <b>Kegiatan :<br/>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Presentase Terpenuhi<br/>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                      | <b>Kota<br/>Denpasar</b> | <b>100%</b> | <b>342.554.986</b> |  | <b>Sekretariat</b> | <b>100%</b> | <b>376.810.485</b> |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                          | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan | Kota<br>Denpasar         | 1 Paket     | 4.768.133          |  | Sekretariat        | 1 Paket     | 5.244.946          |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                        | Kota<br>Denpasar         | 7 Paket     | 243.050.000        |  | Sekretariat        | 7 Paket     | 267.355.000        |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan.                            | Kota<br>Denpasar         | 1 Paket     | 48.172.738         |  | Sekretariat        | 1 Paket     | 52.990.012         |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undang                                       | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undang yang<br>Disediakan         | Kota<br>Denpasar         | 3 Dokumen   | 13.268.115         |  | Sekretariat        | 3 Dokumen   | 14.594.927         |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                | Kota<br>Denpasar         | 1 Laporan   | 33.296.000         |  | Sekretariat        | 1 Laporan   | 36.625.600         |
| 2 | 13 | 01 | 2.07 |    | <b>Kegiatan :<br/>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | <b>Presentase Terpenuhi<br/>Pengadaan Barang Milik<br/>Daerah</b>                           | <b>Kota<br/>Denpasar</b> | <b>100%</b> | <b>281.948.000</b> |  | <b>Sekretariat</b> | <b>100%</b> | <b>310.142.800</b> |

|   |    |    |      |    |   |  |                      |              |                      |  |                    |              |                      |
|---|----|----|------|----|---|--|----------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|--------------|----------------------|
| 2 | 13 | 01 | 2.07 | 06 | Pengandaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | Kota Denpasar        | 48 Unit      | 281.948.000          |  | Sekretariat        | 48 Unit      | 310.142.800          |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 |    | <b>Kegiatan :<br/>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>Presentase Terpenuhi<br/>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                              | <b>Kota Denpasar</b> | <b>100 %</b> | <b>2.233.965.632</b> |  | <b>Sekretariat</b> | <b>100 %</b> | <b>2.457.362.195</b> |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Kota Denpasar        | 12 Laporan   | 237.600.000          |  | Sekretariat        | 12 Laporan   | 261.360.000          |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Kota Denpasar        | 12 Laporan   | 1.996.365.632        |  | Sekretariat        | 12 Laporan   | 2.196.002.195        |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 |    | <b>Kegiatan :<br/>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                       | <b>Presentase Terpeliharanya<br/>Barang Milik Daerah</b>   | <b>Kota Denpasar</b> | <b>100 %</b> | <b>572.380.000</b>   |  | <b>Sekretariat</b> | <b>100 %</b> | <b>629.618.000</b>   |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kota Denpasar        | 24 Unit      | 283.180.000          |  | Sekretariat        | 24 Unit      | 311.498.000          |

|   |    |    |      |    |  |  |                      |                |                      |  |  |                |                      |
|---|----|----|------|----|--|--|----------------------|----------------|----------------------|--|--|----------------|----------------------|
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | Kota Denpasar        | 20 Unit        | 5.200.000            |  | Sekretariat  | 20 Unit        | 5.720.000            |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Kota Denpasar        | 88 Unit        | 79.500.000           |  | Sekretariat  | 88 Unit        | 87.450.000           |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Denpasar        | 1 Unit         | 204.500.000          |  | Sekretariat  | 1 Unit         | 224.950.000          |
| 2 | 13 | 03 |      |    | <b>Program : Peningkatan Kerjasama Desa</b>  | <b>Presentase Fasilitasi Kerjasama Desa</b>  | <b>Kota Denpasar</b> | <b>100%</b>    | <b>8.714.110</b>     |  | <b>Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa</b>                         | <b>100%</b>    | <b>9.585.521</b>     |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 |    | <b>Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>                                 | <b>Jumlah Kerjasama yang terbentuk</b>   | <b>Kota Denpasar</b> | <b>27 Desa</b> | <b>8.714.110</b>     |  | <b>Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa</b>                         | <b>27 Desa</b> | <b>9.585.521</b>     |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                              | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                      | Kota Denpasar        | 1 Dokumen      | 8.714.110            |  | Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa                                | 1 Dokumen      | 9.585.521            |
| 2 | 13 | 04 |      |    | <b>Program : Administrasi Pemerintahan Desa</b>                                    | <b>Presentase Desa yang Tertib Administrasi</b>  | <b>Kota Denpasar</b> | <b>100%</b>    | <b>1.062.345.404</b> |  | <b>Pemerintahan Desa &amp; Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa</b> | <b>100%</b>    | <b>1.168.579.944</b> |

| 2 | 13 | 04 | 2.01 |    | <b>Kegiatan :<br/>Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Penyelenggaraan<br/>Administrasi<br/>Pemerintah Desa</b> | <b>-Jumlah Desa yang mendapat<br/>Pembinaan dan Pengawasan<br/>Penyelenggaraan<br/>Administrasi Pemerintah<br/>Desa<br/>-Jumlah Bumdes yang aktif</b> | <b>Kota<br/>Denpasar</b> | <b>27 Desa<br/><br/>27 Bumdes</b> | <b>1.062.345.404</b> |  | <b>Pemerintahan<br/>Desa&amp;Pembangu<br/>nan dan<br/>Pemberdayaan<br/>Ekonomi Desa</b> | <b>27 Desa<br/><br/>27 Bumdes</b> | <b>1.168.579.944</b> |
|---|----|----|------|----|---|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------|
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa   | Kota Denpasar            | 27 Dokumen                        | 29.927.050           |  | Pemerintahan Desa   | 27 Dokumen                        | 32.919.755           |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa  | Kota Denpasar            | 1 Dokumen                         | 113.332.754          |  | Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa   | 1 Dokumen                         | 124.666.029          |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa   | Jumlah Dokumen Profil Desa  | Kota Denpasar            | 43 Dokumen                        | 56.405.800           |  | Pemerintahan Desa   | 43 Dokumen                        | 62.046.380           |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa  | Kota Denpasar            | 27 Dokumen                        | 94.004.150           |  | Pemerintahan Desa   | 27 Dokumen                        | 103.404.565          |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  | Kota Denpasar            | 10 Dokumen                        | 410.367.900          |  | Pemerintahan Desa   | 10 Dokumen                        | 451.404.690          |

|   |    |    |      |    |  |   |                      |                                  |                      |  |   |                                  |                      |
|---|----|----|------|----|--|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa   | Kota Denpasar        | 27 Dokumen                       | 189.773.000          |  | Pemerintahan Desa   | 27 Dokumen                       | 208.750.300          |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa   | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas  | Kota Denpasar        | 54 Orang                         | 168.534.750          |  | Pemerintahan Desa   | 54 Orang                         | 185.388.225          |
| 2 | 13 | 05 |      |    | <b>Program :</b><br><b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>   | <b>-Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif</b><br><b>-Presentase Pasar Desa dengan fasilitasi yang baik</b> | <b>Kota Denpasar</b> | <b>100%</b><br><b>43%</b>        | <b>2.260.475.280</b> |  | <b>Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa &amp; Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa</b> | <b>100%</b><br><b>43%</b>        | <b>2.486.522.808</b> |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 |    | <b>Kegiatan :</b><br><b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta</b> | <b>-Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif</b><br><b>-Jumlah Pasar Desa dengan fasilitasi yang baik</b>    | <b>Kota Denpasar</b> | <b>27 LKD</b><br><b>15 Pasar</b> | <b>2.260.475.280</b> |  | <b>Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa &amp; Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa</b> | <b>27 LKD</b><br><b>15 Pasar</b> | <b>2.486.522.808</b> |

|   |    |    |      |    | <b>Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   |  |               |            |             |  |  |            |             |
|---|----|----|------|----|--|--|---------------|------------|-------------|--|--|------------|-------------|
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Kota Denpasar | 2 Dokumen  | 132.317.390 |  | Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | 2 Dokumen  | 145.549.129 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                     | Kota Denpasar | 27 Lembaga | 28.019.445  |  | Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | 27 Lembaga | 30.821.390  |

|   |    |    |      |    |  |   |               |           |             |  |  |           |             |
|---|----|----|------|----|--|---|---------------|-----------|-------------|--|--|-----------|-------------|
|   |    |    |      |    | dan Masyarakat Hukum Adat  |   |               |           |             |  |  |           |             |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Kota Denpasar | 1 Dokumen | 435.652.000 |  | Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa                | 1 Dokumen | 479.217.200 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  | Kota Denpasar | 1 Laporan | 94.940.000  |  | Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa                | 1 Laporan | 104.434.000 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat   | Kota Denpasar | 1 Laporan | 63.371.180  |  | Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | 1 Laporan | 69.708.298  |

|   |    |    |      |    |   |  |               |           |               |  |  |           |               |
|---|----|----|------|----|---|--|---------------|-----------|---------------|--|--|-----------|---------------|
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Kota Denpasar | 1 Dokumen | 1.506.175.265 |  | Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | 1 Dokumen | 1.656.792.792 |
|---|----|----|------|----|---|--|---------------|-----------|---------------|--|--|-----------|---------------|

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Tahun 2024 tetap mengacu pada menjadi Sasaran dan Tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja yang akan di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 oleh Sekretariat maupun Bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024**

| No.  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|--|---|--|------------------------|-------------------------------|
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b> |   |  |                        |                               |
|  | <b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>  | <b>100%</b>            | <b>10.241.814.198</b>         |
|  | <b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>100%</b>            | <b>6.810.965.580</b>          |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 35 Orang/Bulan         | 6.807.965.580                 |
| 2  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 1 Dokumen              | 3.000.000                     |
|  | <b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>100%</b>            | <b>342.554.986</b>            |
| 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.                    | 1 Paket                | 4.768.133                     |
| 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.  | 7 Paket                | 243.050.000                   |
| 3  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.   | 1 Paket                | 48.172.738                    |
| 4  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan                             | 3 Dokumen              | 13.268.115                    |
| 5  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan              | 33.296.000                    |
|  | <b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                              | <b>Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>   | <b>100 %</b>           | <b>281.948.000</b>            |
| 1  | Pengandaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 48 Unit                | 281.948.000                   |
|  | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                               | <b>100 %</b>           | <b>2.233.965.632</b>          |
| 1  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan             | 237.600.000                   |
| 2  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan             | 1.996.365.632                 |
|  | <b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                           | <b>Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>   | <b>100 %</b>           | <b>572.380.000</b>            |
| 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 24 Unit                | 283.180.000                   |

|   |   |  |                                    |                      |
|---|---|--|------------------------------------|----------------------|
| 2   | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 20 Unit                            | 5.200.000            |
| 3   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 88 Unit                            | 79.500.000           |
| 4   | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit                             | 204.500.000          |
| <b>Program : Peningkatan Kerjasama Desa</b>   |   | <b>Presentase Fasilitas Kerjasama Desa</b>   | <b>100%</b>                        | <b>8.714.110</b>     |
| <b>Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama antar Desa</b>   |   | <b>Jumlah Kerjasama yang terbentuk</b>   | <b>27 Desa</b>                     | <b>8.714.110</b>     |
| 1   | Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen                          | 8.714.110            |
| <b>Program : Administrasi Pemerintahan Desa</b>   |   | <b>Presentase Desa yang Tertib Administrasi</b>  | <b>100%</b>                        | <b>1.062.445.404</b> |
| <b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa</b>   |   | <b>-Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa</b><br><b>-Jumlah Bumdes yang aktif</b>  | <b>27 Desa</b><br><b>27 Bumdes</b> | <b>1.062.345.404</b> |
| 1   | Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa   | 27 Dokumen                         | 29.927.050           |
| 2   | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa   | 1 Dokumen                          | 113.332.754          |
| 3   | Fasilitas Penyusunan Profil Desa  | Jumlah Dokumen Profil Desa   | 43 Dokumen                         | 56.405.800           |
| 4   | Fasilitas Pengelolaan Aset Desa   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa   | 27 Dokumen                         | 94.004.150           |
| 5   | Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan   | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan   | 10 Dokumen                         | 410.367.900          |
| 6   | Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  | 27 Dokumen                         | 189.773.000          |
| 7   | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa  | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas   | 54 Orang                           | 168.534.750          |
| <b>Program : Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>  |   | <b>-Presentase Lembaga Masyarakat Desa (LKD) aktif</b><br><b>-Presentase Pasar Desa dengan fasilitas yang baik</b>   | <b>100%</b><br><b>43%</b>          | <b>2.260.475.280</b> |
| <b>Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |   | <b>-Jumlah Lembaga Masyarakat Desa (LKD) yang Aktif</b><br><b>-Jumlah Pasar Desa dengan fasilitas yang baik</b>  | <b>27 LKD</b><br><b>15 Pasar</b>   | <b>2.260.475.280</b> |
| 1   | Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 2 Dokumen                          | 132.317.390          |

|   |  |  |            |               |
|---|--|--|------------|---------------|
| 2 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 27 Lembaga | 28.019.445    |
| 3 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa  | 1 Dokumen  | 435.652.000   |
| 4 | Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna   | 1 Laporan  | 94.940.000    |
| 5 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  | 1 Laporan  | 63.371.180    |
| 6 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga   | 1 Dokumen  | 1.506.175.265 |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dibarengi peningkatan tata kelola pemerintahan Desa. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan difokuskan pada fungsi regulasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan.

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan 4 (empat) program dengan 8 (delapan) kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.573.348.992,-

Rencana Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Rencana Program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna.

Denpasar, 02 Desember 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kota Denpasar



**I Wayan Budha, S.IP., M.A.P**

Pembina Tk. I

NIP. 197007151992011001